

**ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN, PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM,
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN**

TAHUN 2016-2020

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Bahrul Ulum
Nomor Mahasiswa : 18313100
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten
Tahun 2016-2020

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Stara 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Bahrul Ulum

Nomor Mahasiswa : 18313100

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan seperti dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Penulis,



Bahrul Ulum

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, Upah Minimum dan
Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten
Tahun 2016-2020

Nama : Bahrul Ulum
Nomor Mahasiswa : 18313100
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Februari 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan yang terutama adalah untuk kedua orang tua tercinta yaitu Mama H. Abdurahman dan Umi Nuraeni. Karena berkat do'a, dukungan, serta barokah beliau semenjak peneliti masa kecil hingga menempuh pendidikan sarjana ini peneliti selalu mendapat keberkahan dan kelancaran. Kemudian, untuk kakak-kakak peneliti yaitu Hendra Supriandi, Hendrik, dan Yayah Rokayah semoga mereka bertiga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan selalu dilancarkan dalam mencari rzkynya. Aminn.

Kemudian untuk orang tua peneliti selama di Yogyakarta, yakni pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Komplek IJ Al-Masyhuriyyah, Ibu Ny.HJ. Ummi Salamah Abdul Qadir, Abah KH. Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi.,M.Eng, dan Ibu Ny. Eni Kartika Sari, M.Sc, yang selalu memberikan do'a serta barokahnya kepada peneliti sejak pertama masuk kuliah hingga saat ini.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016-2020**

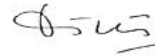
Disusun Oleh : **BAHRUL ULUM**

Nomor Mahasiswa : **18313100**

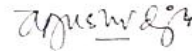
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 11 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, S.E., M.Si.



Penguji : Agus Widarjono, Drs., M.A., Ph.D.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar-Rad Ayat 11)

“Raihlah ilmu, tetapi ketika dalam proses meraih ilmu harus belajar dengan sabar dan tenang”.

(Umar bin Khattab)

”Orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum Warahmatullabi Wabarakatub

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat-nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2016-2020**. Shalawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada suri tauladan kita semua yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'at nya di hari akhi nanti, Amin.

Dalam penyelesaian Skripsi ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini pasti melalui banyak kendala-kendala dan tidak akan selesai jika tanpa adanya dukungan serta do'a dari berbagai pihak baik dalam hal Kerjasama, bantuan, serta bimbingan. Maka dari itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indoensia.
2. Bapak Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
3. Bapak Drs. Agus Widarjono, Ma., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dra. Indah Susantun, M.Si. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Ekonomi dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa nya untuk bersemangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

5. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan dan membuka cakrawala keilmuan baru bagi peneliti yang telah bermanfaat hingga saat ini. Serta seluruh staff dan karyawan Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah bekerja dengan baik, peneliti mengucapkan terimakasih atas keramahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan administrasi dengan baik.
7. Seluruh teman seperjuangan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 yang sudah belajar dan berjuang bersama selama masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
8. Kepada teman-teman senasib dan berjuang bersama selama kuliah yakni Naufal Syafiq (Uut), Ramadhan Pandu, Muhammad Zulfachrozi, Nurul Ubudiyah, Vania, Mutia, Alifia, Iddah, Almira, Tri Yuli, Rafka, Albert, Indra Sakti, Andre, Pausta, Rajiv, yang sering kali tempat mengeluh selama masa perkuliahan ini dan Muhammad Abdul Malik Ridho yang selalu senantiasa membimbing agar bisa lebih baik lagi dalam perkuliahan.
9. Kepada teman-teman satu atap selama tinggal di Yogyakarta yakni teman-teman Santri Komplek IJ Al-Masyhuriyyah, Pak Lurah dan beserta jajaran pengurus.
10. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih atas motivasi serta dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti mengharpkan Ridho serta balasan baik kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berkontribusi dan banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan

Skripsi ini. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini yang menjadikan pengalaman berharga bagi peneliti selamanya.

Akhir kata, sekali lagi terimakasih kepada seluruh pihak tersebut dan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu karena tanpa mereka penelitian ini tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya, semoga penelitian ini dapat menjadi manfa'at bagi semuanya khususnya untuk Prodi Ekonomi Pembangunan.

Wallabulmufiq Illa Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullabi Wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Februari 2022



Bahrul Ulum

Nim. 18313100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	16
2.1. Kajian Pustaka.....	16
2.2. Landasan Teori	21
2.2.1. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	21
2.2.2. Definisi Kemiskinan	24
2.2.3. Pendidikan.....	29
2.2.4. Upah Minimum	33
2.2.5. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	36

2.3. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen.....	39
2.3.1. Hubungan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	39
2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	40
2.3.3. Hubungan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	41
2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	42
2.4. Kerangka Penelitian	43
2.5. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3. Metode Analisis.....	48
3.4. Pemilihan Model.....	51
3.5. Analisis Statistik.....	52
BAB IV	55
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1. Gambaran Umum Provinsi Banten	55
4.2. Deskripsi Data Penelitian	56
4.1. Hasil dan Pembahasan	67
BAB V.....	72
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Implikasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	80

ABSTRAK

Penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini akan menampilkan tingkat indeks pembangunan manusia berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dengan data cross-section Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Banten dan data time-series tahun 2016-2020. Kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia). Model dalam penelitian ini mampu untuk menjelaskan IPM sebesar 92.63% oleh karena itu hal ini dapat dibuktikan pada uji random effect model pada R^2 sebesar 0.926390. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) dapat menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) sebesar 7.37%.

Kata Kunci: Analisis pengaruh kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian ini akan menampilkan tingkat indeks pembangunan manusia berdasarkan 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020, sehingga nantinya akan dapat memberikan informasi baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, itu menandakan keberhasilan perekonomian suatu wilayah karena salah satu tujuan yang dijadikan tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Indeks pembangunan manusia berperan penting bagi perekonomian suatu negara, karena ketika tingkat kemampuan penduduk meningkat yang mana ini dibentuk dari pembangunan manusia suatu wilayah, akan dapat berperan dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara sehingga dapat diartikan IPM memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi perekonomian suatu negara, begitu juga sebaliknya perekonomian suatu negara memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap IPM karena ketika terciptanya kesejahteraan masyarakat maka itu menandakan suatu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Menurut Siti Nur Fatimah (2018), hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2010-2015. Selain itu menurut Nur Isa Pratowo (2012) menyampaikan hasil dari penelitiannya bahwa tingkat belanja daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2009.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu alat ukur untuk melihat keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan manusia berdasarkan komponen kualitas hidup. IPM dapat dihitung berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yaitu capaian umur panjang, angka melek huruf, tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan, dan daya beli penduduk terhadap kebutuhan pokoknya yang dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita (Marhaini, Yati, & M. Tribudhu, 2007). Oleh karena itu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, akan menganalisis tingkat pengaruh dan signifikan variabel independen (kemiskinan, pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia).

Pulau Jawa terdiri dari enam Provinsi, salah satunya Provinsi Banten yang mana sebelum tahun 2000 Banten belum menjadi sebuah Provinsi karena pada saat itu Banten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semenjak tahun 2000 Banten memisahkan diri dari Jawa Barat sehingga menjadi salah satu Provinsi di Pulau Jawa, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan (Fatimah, 2018).

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan sebesar 5,51% di tahun 2016 kemudian pada tahun 2020

sebesar 5,32%, tetapi pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mengalami penurunan yang sangat dalam mencapai -3,08% karena adanya pandemi, oleh karena itu penulis meneliti apakah dengan adanya kenaikan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Berikut ini merupakan data tingkat pembangunan manusia di Pulau Jawa:

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa Tahun 2016-2020

Provinsi di Pulau Jawa	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	79.60	80.06	80.47	80.76	80.77
Jawa Barat	70.05	70.69	71.30	72.03	72.09
Jawa Tengah	69.98	70.52	71.12	71.73	71.87
DI Yogyakarta	78.38	78.89	79.53	79.99	79.97
Jawa Timur	69.74	70.27	70.77	71.50	71.71
Banten	70.96	71.42	71.95	72.44	72.45

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tabel 1.1. menunjukkan indeks pembangunan manusia tertinggi di Pulau Jawa berada di DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar 80,33% dibandingkan dengan Provinsi Banten yang berada di peringkat ke tiga dengan rata-rata sebesar 71,84% dapat diartikan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten masih terbilang rendah dibandingkan DKI Jakarta.

Menurut Zainuddin (2015), proses pembangunan ekonomi suatu daerah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan penduduknya, karena bagaimanapun suatu kesejahteraan merupakan suatu hak baik kelompok maupun individu agar dapat terpenuhinya komponen-komponen dasar sehingga dapat hidup dengan

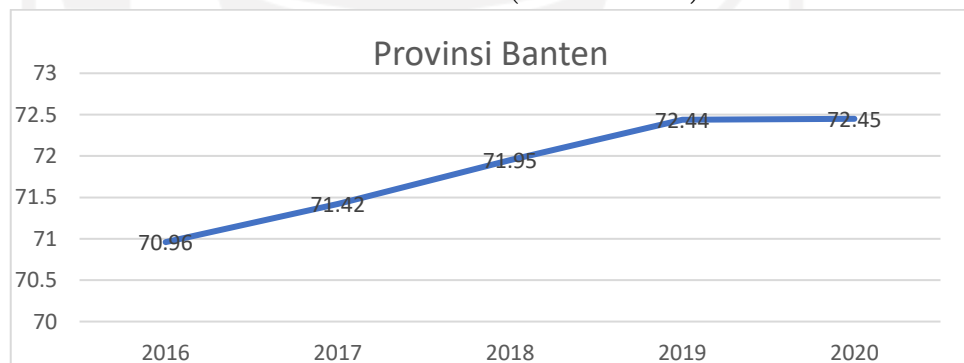
layak yang sesuai dengan standar hidup manusia. Oleh karena itu permasalahan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan upaya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar terciptanya suatu kesejahteraan yang adil dan merata pada tingkat tertentu.

Menurut BPS dalam Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf (2014), menjelaskan bahwasanya tolak ukur keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, melainkan ada yang lebih penting yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses agar penduduk dapat lebih banyak untuk memilih dalam pemberdayaan guna untuk meningkatkan kemampuan dasarnya sehingga ketika suatu penduduk dapat meningkatkan kemampuan dasarnya, maka penduduk dapat dengan mudah untuk berperan di segala bidang agar dapat menciptakan suatu pembangunan daerah.

Menurut Ramirez dkk dalam Siti Nur Fatimah (2018) dalam katalog BPS, menjelaskan bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten tahun 2010 hubungannya positif yang sangat kuat anatar pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pembangunan manusia dari segi aktivitas rumah tangga dan pemerintah, sehingga terciptanya peran sipil seperti lembaga swadaya masyarakat. Dari aktivitas tersebut secara tidak langsung dapat berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia seperti pengeluaran untuk kebutuhan pokok sehari-hari dalam rumah tangga, pengeluaran untuk biaya Pendidikan, pengeluaran untuk kehesatan, dan untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam bekerja, disampaikan oleh Ramirez dkk dalam Siti Nur Fatimah (2018).

Pembangunan manusia yang tinggi dari segi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas dan kreativitas penduduk (tenaga kerja). Sehingga berdasarkan hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, *United Nations Development Programme* (UNDP) melakukan kategorisasi terhadap hubungan kedua variabel tersebut menjadi kategori yang dapat menjadi hubungan yang kuat dan hubungan yang lemah, karena terkadang hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi selalu berbuah terkadang menjadi seimbang dan terkadang juga tidak seimbang, sehingga menimbulkan hubungan yang kuat dan lemah (Fatimah, 2018).

Grafik 1.1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 72.45 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 72.44 persen pada tahun 2019. Tetapi ada yang lebih parah lagi sebelum tahun 2019, yaitu pada tahun 2016 indeks pembangunan

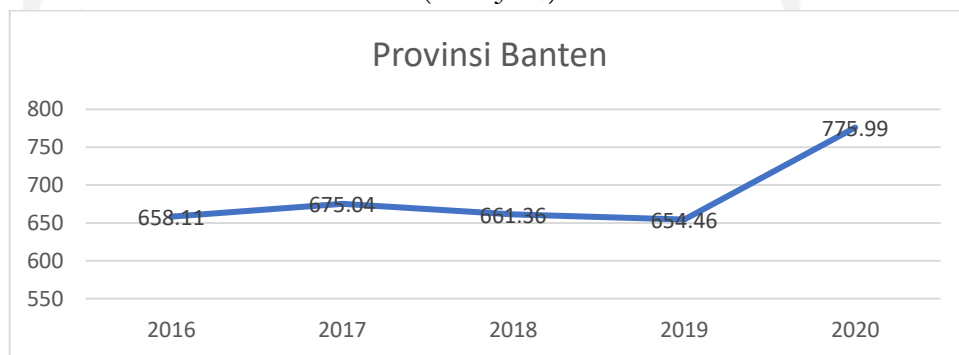
manusia di Provinsi Banten hanya sebesar 70.96 persen kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 71.42 persen dan sebesar 71.95 persen pada tahun 2018. Jadi dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pengukuran kemiskinan disuatu daerah biasanya untuk melihat kondisi atau fenomena yang terjadi di daerah tersebut sehingga dari fenomena ini yang mengakibatkan kemiskinan biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk dan tingkat kesehatan. Yang mana dalam fenomena ini tingkat pendapatan penduduk dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, karena ketika suatu penduduk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidupnya maka akan terciptanya suatu kesejahteraan penduduk dan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Fenomena yang lainnya yaitu tingkat kesehatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan suatu penduduk, contohnya ketika suatu penduduk dapat hidup dengan sehat maka secara tidak disadari kesehatan dapat memberikan berbagai peluang bagi penduduk salah satunya adalah dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya atau panjang umur (Fatimah, 2018).

Menurut Bappenas dalam Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) menjelaskan bahwasanya kemiskinan merupakan suatu kondisi penduduk baik perorangan maupun kelompok yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga tidak mampu untuk mempertahankan kesejahteraan dalam kehidupannya. Terjadinya kemiskinan disebabkan karena tidak adanya komponen-komponen dasar dalam kehidupan sehari-harinya, maupun ketidakmampuan dalam segi pendidikan dan peluang kerja (Bappeda). Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwasanya kemiskinan penduduk di suatu wilayah dapat memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Grafik 1.2. Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2016-2020
(Ribu Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada grafik 1.2. menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 775.99 ribu jiwa, yang artinya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020 lebih buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar 654.46 ribu jiwa pada tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 ini menunjukkan jumlah penduduk miskin menduduki paling rendah dan menduduki peringkat pertama atas penurunannya penduduk miskin di Provinsi Banten.

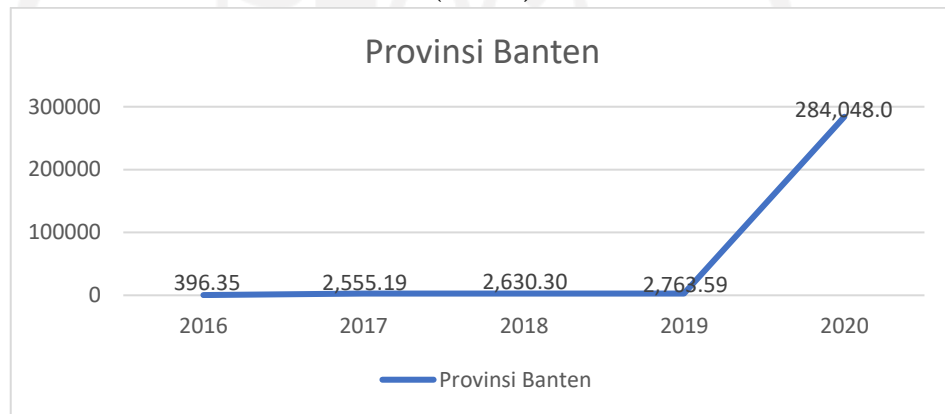
Menurut Nurkholis (2013), pendidikan adalah suatu proses yang dapat berperan untuk membentuk sifat atau karakter manusia dan membangun kemampuan manusia agar dapat menentukan nasib untuk kedepannya. Pendidikan juga merupakan suatu komponen yang dapat menyeimbangkan dan

menyempurnakan dalam pembangunan masyarakat baik individu maupun kelompok. Dengan adanya pendidikan yang dapat mengajarkan dan membentuk kemampuan atau keahlian, suatu negara dapat dengan mudah untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, dan keahlian kepada generasi yang akan datang sehingga dapat mendorong masa depan yang lebih cerah.

Seiring berjalannya proses pembangunan suatu daerah nampaknya indeks pembangunan manusia mengalami pergerakan yang relatif lambat. Pencapaian yang pasti ingin dicapai oleh suatu negara atau daerah adalah ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi dalam proses ini bukanlah hal yang mudah, karena jumlah penduduk yang begitu besar dan dengan masing-masing latar belakang masyarakat yang berbeda di segi kebudayaannya. Hambatan dalam proses pembangunan manusia adalah kemiskinan yang mana ini dapat menghambat suatu penduduk dalam mendapatkan tingkat pendidikan yang diinginkan, karena ketika suatu penduduk tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai maka tingkat kemampuan masyarakat akan rendah sehingga sumberdaya manusia juga akan rendah. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu upaya yang efektif untuk mendorong agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya itu saja tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu penduduk akan dapat meningkatkan kualitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan asupan gizi yang baik. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah wajib belajar 9 tahun, sehingga akan terciptanya kualitas sumberdaya manusia yang mana dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang dimiliki masyarakat, untuk kedepannya akan dapat berkontribusi terhadap angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan lama bersekolah (Imelda, Balafif,

& Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Grafik 1.3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Banten
Tahun 2016-2020
(Triliun)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Grafik diatas menunjukkan anggaran pemerintah di sektor pendidikan, yang mana pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 284.048,0 triliun sehingga pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mana dalam kondisi pandemi ini tidak diadakan sekolah tatap muka, sehingga pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar guna untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana selama sekolah daring berlangsung mulai dari kuota internet bulanan, sumbangan handphone bagi masyarakat yang kurang mampu untuk keberlangsungan sekolah daring, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada tahun 2020 sangat besar dibandingkan dengan

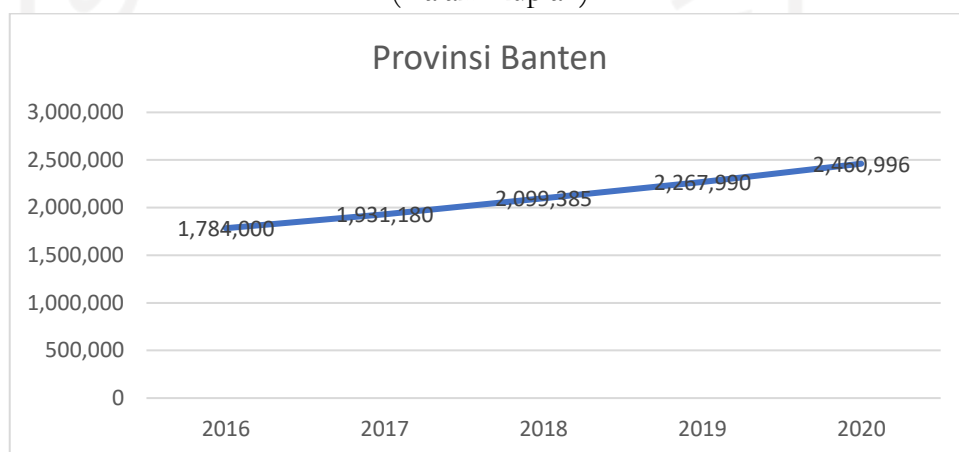
tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar sebesar 2 triliun pada tahun 2017-2019 dan pada tahun 2016 hanya sebesar 396,35 milyar.

Menurut Bappeda dalam Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf (2014), mengatakan bahwa tenaga kerja tidak akan terlepas dari yang namanya upah minimum regional (UMR), karena upah minimum merupakan suatu pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah dengan membuka usahanya baik pabrik maupun industri dengan harapan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena ketika upah minimum di suatu wilayah itu tinggi maka menunjukkan tingkat perekonomiannya juga tinggi. Upah minimum merupakan salah satu indikator bagi penduduk yang sedang bekerja agar dapat mempertahankan nilai pendapatannya agar tidak menurun sehingga dapat memenuhi komponen-komponen dasar dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya itu saja upah minimum juga merupakan salah satu daya tarik perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas pekerja dalam jangka panjang. Maka dengan adanya upah minimum tersebut akan terciptanya suatu kesejahteraan penduduk sehingga dapat menjalankan kehidupan yang sesuai dengan standar hidup layak, hal ini disampaikan oleh Sulistiawati & Rini dalam Dede Edwin Megantara & Made Kembar Sri Budhi (2020).

Upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan penduduk (tenaga kerja) dari tahun ke tahun sehingga dengan adanya upah minimum ini, penduduk (tenaga kerja) dapat meningkatkan kemampuannya dalam permintaan barang dan jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya agar dapat hidup dengan layak yang sesuai dengan standar hidup manusia. Dengan demikian, dapat terciptanya suatu pembangunan manusia, karena pembangunan manusia terjadi ketika penduduk dapat hidup dengan layak yang

sesuai dengan standar hidup manusia seperti tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat Pendidikan, dan memiliki umur yang panjang (Zainuddin, 2015). Dari penjelasan upah minimum dapat disimpulkan bahwa upah minimum ini dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

Grafik 1.4. Upah Minimum di Provinsi Banten Tahun 2016-2020
(Dalam Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada grafik 1.4. menunjukkan upah minimum di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, yang mana pada tahun 2020 upah minimum di Provinsi Banten sebesar Rp. 2.460.996 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya sebesar Rp. 2.267.990 tahun 2019, Rp. 2.099.385 tahun 2018, Rp. 1.931.180 tahun 2017, dan Rp. 1.784.000 pada tahun 2016 sehingga dapat disimpulkan upah minimum di Provinsi Banten mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

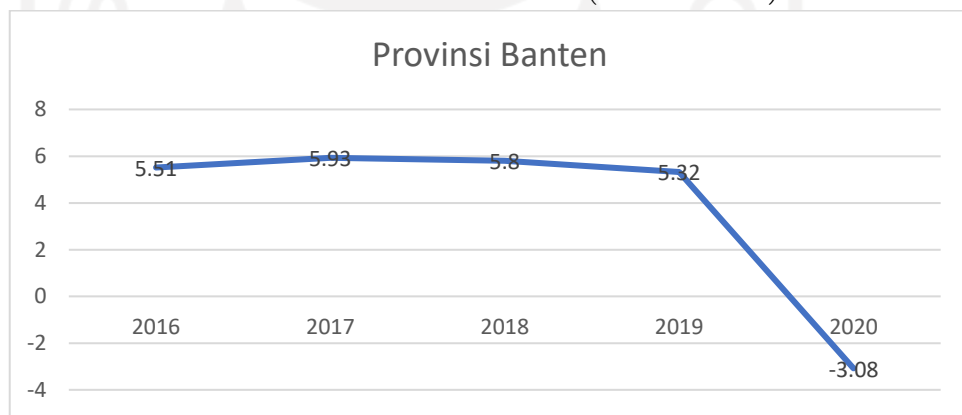
Menurut Bappeda dalam Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf (2014), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan aktivitas perekonomian suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan penduduk pada kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu wilayah dapat dinyatakan tumbuh dari tahun sebelumnya apabila balas jasa riil mengalami pertumbuhan terhadap penggunaan faktor produksi sehingga dapat lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui atau dilihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya, apabila balas jasa riil mengalami pertumbuhan terhadap penggunaan faktor produksi sehingga dapat lebih besar dari tahun sebelumnya.

Menurut Kairupan dalam Zainuddin (2015) menjelaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai bersih atas barang dan jasa yang dihasilkan dari beberapa sektor usaha dengan kurun waktu tertentu. Ketika Produk Domestik Bruto (PDRB) naik maka tingkat pendapatan perkapita penduduk (tenaga kerja) juga akan naik, dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk (tenaga kerja) maka tingkat permintaan atas barang dan jasa juga akan meningkat sehingga terciptanya kesejahteraan penduduk. Maka dengan adanya peningkatan diberbagai sektor tersebut suatu wilayah dinyatakan berhasil dalam menjalankan proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang di suatu negara/daerah, karena bagaimanapun pemerintah bersangkutan atas kebijakan-kebijakan agar suatu proses pembangunan dapat di capai, oleh karena itu yang bersangkutan dengan masyarakat untuk menyediakan

berbagai barang-barang ekonomi, disampaikan oleh Todaro dalam Zainuddin (2015). Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena disebabkan dengan adanya kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan barang-barang ekonomi salah satunya lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi penduduknya guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik barang maupun jasa. Dengan demikian, suatu penduduk dapat melangsungkan hidup layak standar kehidupan manusia (Zainuddin, 2015).

Grafik 1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam PDRB Harga Konstan di Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Pada grafik 1.5. menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten berdasarkan PDRB harga konstan mengalami penurunan yang lumayan dangkal sebesar -3,08% pada tahun 2020, yang mana pada tahun sebelumnya dari tahun 2016-2019 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten masih diatas 5%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lumayan dangkal karena menyentuh

-3% yang mana dari penurunan ini diakibatkan oleh kondisi suatu negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Harapan atas tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Agar dapat menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten tahun 2016-2020.
2. Agar dapat menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020.

3. Agar dapat menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020.
4. Agar dapat menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2016-2020.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, dapat menjadi referensi penelitian yang serupa dan tugas kuliah bagi mahasiswa.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengalaman dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah dipelajari dibangku perkuliahan.
3. Bagi pemerintah, dapat menjadi sumber informasi mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia, yang kemudian dapat dijadikan salah satu referensi pemerintah dalam membuat kebijakan atau mengevaluasi terhadap kualitas hidup penduduk di Provinsi Banten

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu antara kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan adanya kajian pustaka ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan memiliki pendukung yang kuat sehingga penelitian yang akan dilakukan memberikan hasil analisis yang kuat berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu:

Herman (2018) meneliti tentang pengaruh upah minimum kota terhadap indeks pembangunan manusia Kota Pekanbaru tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa data *time series* di Kota Pekanbaru tahun 2009-2016 kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 79,6 persen.

Nofrian Eka Putra (2018) meneliti tentang analisis pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari data *time series* dan data *cross-section* berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2015 kemudian metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan dan

pengangguran berpengaruh positif, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Amirul Zamharir (2016) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB perkapita, dan upah minimum terhadap *human development indeks* di 12 provinsi dengan kategori *lower medium* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berupa regresi data panel gabungan dari data *cross-section* dan *time series* 12 provinsi di Indonesia tahun 2011-2014 sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda data panel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, PDRB per kapita, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *human development indeks* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*. Hasil hipotesis yang kedua variabel pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan upah minimum secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *human development indeks* di 12 provinsi Indonesia dengan kategori *lower medium*, sedangkan untuk hasil hipotesis dari variabel kemiskinan secara persial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *human development indeks* di 12 provinsi Indonesia.

Siti Nur Fatimah (2018) meneliti tentang analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2010-2015. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berupa regresi data panel gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2015 sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap IPM, variabel pengangguran

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap IPM.

Sri Desmiarti (2019) meneliti tentang pengaruh PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif, sedangkan untuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen (produk domestik bruto dan tingkat pengangguran terbuka) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Langkat.

Yunus Permana Hasiholan Simarmata (2019) meneliti tentang analisis pengaruh kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode kuantitatif data berkala (*cross-section*). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Zainuddin (2015) meneliti tentang analisis dampak inflasi, PDRB dan perkembangan upah minimum regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *time series* tahun 2005-2013 sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen (inflasi, produk domestik regional bruto dan perkembangan upah minimum regional) mempengaruhi sebesar 92,94% terhadap indeks pembangunan manusia.

M. Ayub (2018) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di provinsi Jambi tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* tahun 2010-2015 sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan kemiskinan dapat memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sehingga, variabel independen (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan) hanya mampu mempengaruhi sebesar 51,1% terhadap variabel indeks pembangunan manusia.

Nur Isa Pratowo (2012) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* menurut Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2009 kemudian metode yang digunakan adalah model regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sehingga elastisitas peningkatan indeks pembangunan manusia dengan peningkatan belanja daerah adalah sebesar 0,032 persen apabila belanja daerah naik 1 persen maka indeks pembangunan manusia juga akan naik sekitar 0,032 persen.

Meylina Astri, dkk (2013) meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dan data *cross-section* berdasarkan 28 provinsi di Indonesia tahun 2007-

2008 kemudian metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara bersamaan memberikan pengaruh positif, namun sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan sektor pendidikan dan sektor kesehatan dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Deni Sulistio Mirza (2012) meneliti tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari data *time series* dan data *cross-section* berdasarkan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, kemudian metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal secara bersamaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Firda Rizky Amalia & Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2014) meneliti tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keseharian alokasi belanja terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan data panel gabungan dari data *time series* dan data *cross-section* berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012, kemudian metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah dan keseharian alokasi belanja secara simultan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga dapat disimpulkan ketika kemandirian belanja daerah dan keseharian alokasi belanja meningkat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan kajian pustaka maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan signifikan variabel independen (tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (terikat) di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan data sekunder yang berupa data panel gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020 dengan menggunakan metode regresi data panel. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya di Provinsi Banten, ada dua perbedaan yang pertama yaitu pada variabel independen yang berbeda dalam penelitian ini, yang mana peneliti menggunakan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan upah minimum tetapi pada penelitian sebelumnya variabel ini tidak dipakai. Yang kedua perbedaan tahun penelitian yang dilakukan, yang mana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2010-2015 kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tahun 2016-2020.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia di definisikan oleh *The United Development Program* (UNDP) bahwa IPM merupakan proses pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah agar masyarakat di daerah tersebut mendapatkan beragam macam pilihan dalam kehidupannya. Pilihan yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah memiliki umur yang panjang dan hidup dengan sehat, sehingga disusul dengan pilihan di sektor pendidikan agar suatu masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya

sehingga dapat menikmati kehidupan layak yang sesuai dengan standar hidup manusia, disampaikan oleh Hakim (2002). *The United Development Program* (UNDP) ketika mengukur perkembangan kesejahteraan suatu negara yaitu berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena IPM merupakan suatu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan standar hidup manusia.

Menurut (Kuncoro, 2009), menjelaskan mengenai komponen-komponen dasar yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan kualitas hidup masyarakat yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan hidup layak yang sesuai dengan standar kehidupan. Ketika suatu negara menetapkan kategori IPM maka harus didasarkan pada skala 0,0-0,10 yang terdiri dari tiga kategori sebagai berikut:

1. Kategori nilai IPM rendah yaitu: 0-0,05
2. Kategori nilai IPM menengah yaitu: 0,51-0,79
3. Kategori nilai IPM tinggi: 0,8-1

2.2.1.1. Komponen-Komponen Dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Memiliki umur panjang

Umur panjang merupakan alat untuk mengukur tingkat kesehatan dan asupan nutrisi. Umur panjang diukur dengan melihat rata-rata kesempatan hidup dalam satu tahun dari mulai tingkat angka kelahiran, yang kemudian diasumsikan dalam satu tahun tertentu bahwa akan mengalami kematian seketika disetiap kelompok umur dalam sepanjang hidupnya (Hakim, 2002).

2. Tingkat Pendidikan

Menurut (Hakim, 2002), ketika hendak menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), komponen pendidikan diukur dengan menggunakan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf dan rata-rata waktu yang dihabiskan di sekolah. Rata-rata persentase angka melek huruf adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bisa menulis huruf dan bisa membaca huruf karena jumlah rata-rata lama bersekolah dijenjang pendidikan formal yaitu berusia 15 tahun ke atas, sehingga indikator pendidikan dihitung dari seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan dan yang sedang diduduki oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.

3. Standar Kehidupan

Menurut (Todaro, 2011) dalam teorinya mengemukakan bahwa standar hidup manusia ketika diukur dengan pendapatan riil perkapita, itu disesuaikan dengan *purching power parity* (paritas daya beli) dari mata uang setiap Negara agar dapat menunjukkan biaya hidupnya sehingga standar kehidupan dimasing-masing negara dapat diketahui. Ketika suatu negara memiliki standar hidup yang tinggi, maka negara tersebut memiliki pendapatan yang tinggi, rendahnya ketimpangan pendapatan, sistem pendidikan yang berkualitas, dan kondisi kesehatan penduduk yang baik. Kemudian ketika suatu negara tidak memiliki standar hidup yang layak atau tinggi, itu menandakan bahwa negara tersebut sedang mengalami ketimpangan pendapatan yang parah, tingkat kesehatan penduduk yang rendah, dan tingkat pendidikan yang tidak berkualitas.

2.2.2. Definisi Kemiskinan

Menurut World Bank dalam Bhima Nur Santiko (2009), kemiskinan merupakan hilangnya kesejahteraan suatu penduduk. Intinya, permasalahan kemiskinan merupakan batasan-batasan dari kesejahteraan penduduk pada suatu daerah tertentu. Dalam teori ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu penduduk maka permintaan akan barang konsumsi juga tinggi sehingga secara tidak disadari tingkat kesejahteraan juga meningkat, karena terciptanya kesejahteraan merupakan kemampuan masyarakat untuk memenuhi komponen-komponen dasar agar dapat hidup dengan layak yang sesuai dengan standar hidup manusia. Kemiskinan dalam arti lain yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi komponen-komponen dasar yang sesuai dengan standar hidup, dari ketidakmampuan ini suatu penduduk kehilangan kesejahteraan.

Menurut Badan Pusat Statistik & Departemen Sosial dalam Bhima Nur Santiko (2009), kemiskinan merupakan rendahnya pendapatan individu sehingga rendahnya juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya agar dapat hidup dengan layak.

Menurut Bappenas Dalam Yunus Permana Hasiholan Simaratama (2019), definisi kemiskinan merupakan kondisi suatu penduduk baik kelompok maupun individu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, agar dapat menjalani kehidupan dengan layak dan bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang mengakui bahwa masyarakat miskin, mempunyai hak-hak dasar dalam hidup layak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan juga bukan hanya diukur dari ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan dalam hak dasar dan perlakuan baik sekelompok individu

dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Bukan hanya itu saja kemiskinan juga merupakan kondisi atas keterbatasan masyarakat dalam memenuhi komponen dasar kehidupan seperti konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Keterbatasan sosial kehidupan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan terkadang memiliki keterbatasan untuk menjalankan kehidupan yang layak seperti air bersih, rumah layak huni, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Sehingga dari keterbatasan itu, penduduk miskin selalu dalam keadaan atau ancaman dalam kondisi seperti gizi buruk akibat kekurangan gizi yang dapat, ancaman ini merupakan salah satu ancaman yang serius karena gizi buruk dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan harus dilakukan guna untuk memangkas atas keterbatasan yang dialami oleh masyarakat tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, disampaikan oleh Bappenas dalam Siti Nur Fatimah (2018).

2.2.2.1. Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan

Menurut Bappenas (2018), kemiskinan bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi alam dan lingkungan, seperti distribusi sumberdaya tidak merata dan lingkungan yang dikategorikan dibawah standar hidup layak sehingga dari faktor ini masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan.
- b. Penduduk, meningkatnya pertumbuhan penduduk disetiap tahunnya sehingga sumberdaya alam tidak mampu menyeimbangi terhadap pertumbuhan penduduk.

- c. Eksploitasi yang terjadi antar kelas, kelompok, wilayah, dan adanya ketidakseimbangan antara negara maju dan negara berkembang.
- d. Kelembagaan dan struktural, seperti adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetapi dapat berdampak negatif terhadap penduduk di pedesaan.
- e. Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi komponen-komponen dasar agar dapat hidup dengan standar manusia.

2.2.2.2. Jenis Kemiskinan

Menurut Arsyad Lincoln dalam Siti Nur Fatimah (2018) menjelaskan ada dua macam jenis kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut merupakan golongan kemiskinan baik individu maupun kelompok yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk kehidupan sehari-harinya agar dapat hidup dengan layak.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif merupakan suatu keadaan dimana masyarakat baik individu maupun kelompok yang sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tetapi keadaanya masih lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat lain.

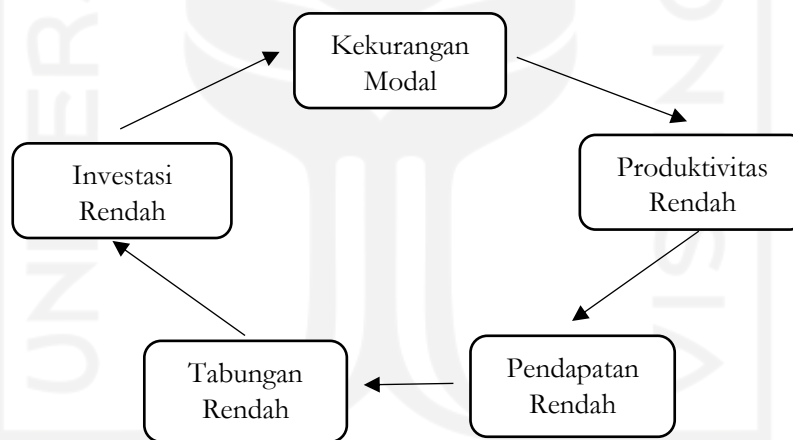
2.2.2.3. Teori Kemiskinan

Menurut Sharp et al dalam Siti Nur Fatimah (2018) menjelaskan dalam bukunya Mudrajat Kuncoro (1997) bahwasanya ada tiga teori kemiskinan yang menjabarkan penyebab terjadinya kemiskinan yaitu yang pertama terjadinya kemiskinan dapat dilihat dari tingkat perekonomian yang kecil, yang mana akibat akibat terjadinya kemiskinan karena kurangnya sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah sehingga penduduk memiliki kekurangan dalam kualitas kehidupannya dan terjadi ketimpangan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Yang kedua, sumberdaya manusia yang artinya ketika suatu negara atau daerah tingkat sumberdaya manusianya rendah maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Ketiga adalah modal, karena modal merupakan pendapatan suatu penduduk untuk memulai suatu usahanya agar dapat meningkatkan tingkat pendapatannya sehingga dapat mencapai garis kehidupan yang lebih layak yang sesuai dengan standar hidup manusia, maka ketika suatu penduduk tidak mempunyai modal karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai pekerjaan tetapi pendapatannya yang relatif masih rendah akan kesulitan untuk memulai usahanya karena modal yang dimiliki masih jauh dibawah rata-rata.

Dari ketiga teori diatas merupakan penyebab terjadinya kemiskinan disuatu wilayah, sehingga dari tiga teori tersebut memunculkan teori lingkaran setan yang ditemukan oleh Regnar Nukse dalam Siti Nur Fatimah (2018). Mudrajat Kuncoro mengatakan dalam bukunya “*a poor country is poor*” (Negara itu miskin karena dia miskin).

Ketika terjadinya kekurangan modal maka akan menimbulkan suatu masalah yaitu tingkat pendapatan yang diterima akan rendah sehingga berdampak pada tabungan dan investasi, karena terjadinya penurunan produktivitas suatu negara atau daerah. Minimnya tabungan dan investasi suatu negara akan mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya keterkaitan tersebut diharapkan suatu kebijakan yang dikeluarkan dapat memotong atau mengurangi lingkaran kemiskinan. Berikut ini merupakan gambaran lingkaran kemiskinan.

Gambar 2.2.1.3.1. Lingkaran Kemiskinan



Sumber: Mudrajad Kuncoro (1997)

2.2.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu masyarakat, dengan menggunakan dua indikator yaitu rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan tolak ukur suatu masyarakat dalam menjalankan pendidikan formal dengan kurun waktu yang telah ditentukan dalam pendidikan terhadap penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan angka melek huruf merupakan hasil presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menjalankan rata-rata lama sekolah dengan kategori sudah dapat membaca dan menulis huruf baik huruf latin maupun huruf lainnya. Kedua indikator ini kemudian dihitung dengan menggabungkan antara indikator rata-rata lama sekolah dengan angka melek huruf, yang mana dalam proses penghitungannya rata-rata lama sekolah mempunyai bobot sepertiga sedangkan angka melek huruf memiliki bobot dua per tiga.

Dalam proses penghitungan anatar indikator pendidikan ini mempunyai dau batasan yang dipakai yang sudah ditentukan dan sepakati oleh beberapa negara, yaitu batas maksimum untuk angka melek huruf dalah 100 sedangkan angka minimumnya adalah 0 (nol). Dalam proses penghitungan ini menggambarkan seberapa besar persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis. Sementara dalam penghitungan rata-rata lama sekolah batas maksimumnya adalah 15 tahun dan batas minimumnya adalah sebesar 0 (nol). Penghitungan rata-rata lama sekolah dalam batas maksimum 15 tahun menjadi suatu alat untuk mengindikasikan tingkat pendidikan yaitu setara dengan kelulusan tingkat SMA (BPS, 2006).

a. Angka Melek Huruf

Pada umumnya, ketika suatu penduduk mengalami permasalahan dalam bidang pendidikan yaitu buta huruf atau buta aksara, hal ini merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Sehingga dalam permasalahan ini suatu penduduk baik individu maupun kelompok secara tidak disadari mengalami ketertinggalan dari penduduk lainnya. Karena bagaimanapun membaca dan menulis merupakan salah satu bekal agar dapat melihat dunia, ketika seseorang mampu membaca dan menulis atau dapat meningkatkan kemampuannya ketika berada dalam masa belajar disekolah, ini akan dapat dengan mudah melihat dunia dari segala sisi perkembangannya. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia agar dapat hidup sesuai dengan standar kehidupan manusia. Ketika suatu negara atau daerah dalam proses pembangunan maka salah satu tolak ukur pembangunan tersebut adalah indeks pembangunan manusia, karena untuk melihat tingkat kesejahteraan dan tingkat harapan hidup. Oleh karena itu dapat diartikan apabila suatu penduduk makin melek huruf, maka suatu penduduk atau masyarakat akan semakin maju untuk kedepannya (Arifin, 2015).

Menurut BPS (2012) menjelaskan bahwa angka melek huruf merupakan salah satu indikator atau alat untuk melihat perkembangan disektor pendidikan. Semakin tinggi angka melek huruf suatu penduduk maka semakin tinggi juga mutu kualitas sumber daya manusia, karena ketika suatu penduduk baik individu maupun kelompok memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis maka dapat diasumsikan penduduk tersebut

memiliki kemampuan sehingga dapat dengan mudah untuk menyerap informasi baik lisan maupun tulisan.

Adapun kebijakan pemerintah dalam pemberantasan angka melek huruf ini, yaitu dengan cara wajib bersekolah dengan prioritas usia 10-44 tahun, agar dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan tersebut suatu penduduk dapat belajar membaca dan menulis sehingga untuk kedepannya dapat menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari dan agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan ketentuan syarat yang terpenuhi (Arifin, 2015).

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu komponen dasar dalam kehidupan manusia, bukan hanya itu saja pendidikan juga adalah faktor utama dalam pembangunan suatu negara untuk mencapai kemakmuran, sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD, 1945) tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 dalam UU menegaskan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pembiayaannya wajib dibiayai oleh pemerintah. Ayat 3 menetapkan kualitas pendidikan nasional yang mengajarkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia guna untuk mencerdaskan anak bangsa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ayat 4 menetapkan mengenai anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 dalam Mochammad Yuli Arifin (2015) yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu usaha dasar dalam perencanaan untuk mewujudkan peserta didik agar dapat aktif untuk mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya diberbagai bidang yaitu keagamaan, kepribadian, dan kecerdasan, agar terciptanya akhlak mulia dan keterampilan yang perlu dimilikinya.

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun keatas, ketika menduduki bangku sekolah atau pendidikan formal. Dalam indikator rata-rata lama sekolah dihitung dalam tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang dan pendidikan sedang dijalani.

2.2.3.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Wagner

Dalam teori Wagner menekankan perkembangan terhadap persentase *Gross National Product* (GNP) yang semakin besar. Karena ketika dalam aktivitas perekonomian GNP meningkat maka persentase pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, karena pemerintah juga harus mengatur hubungan dalam masyarakat, hukum, kesehatan, dan pendidikan.

b. Teori Peacock dan Wiseman

Dalam teori ini memandang bahwa pemerintah selalu memperbesar anggaran pengeluaran, sedangkan masyarakat sendiri terkadang tidak suka untuk membayar pajak yang semakin besar guna untuk membiayai pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ketahunnya.

2.2.3.2. Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Menurut Michael P. Todaro dalam Septian M.M Sanggelorang, dkk (2015), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan ada dua jenis pembiayaan yaitu biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya tidak langsung. Biaya pendidikan individual merupakan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan per kapita suatu masyarakat.

2.2.4. Upah Minimum

2.2.4.1. Pengertian Upah Minimum

Menurut Devanto Shasta Pratomo & Putu Mahardika Adi Saputra (2011), upah minimum merupakan pendapatan bulanan minimum (terendah) suatu penduduk (tenaga kerja) dari perusahaan sebagai imbalan atas suatu aktivitas produksi baik barang maupun jasa. Upah minimum yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang atas dasar perundang-undangan yang kemudian dibayarkan kepada tenaga kerja atas dasar perjanjian karyawan dan perusahaan, sebagaimana telah diatur dalam PP No. 8/1981 mengenai peraturan upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional sektoral maupun subsektoral. Dengan ini upah minimum merupakan upah pokok dan tunjangan tetap penduduk (tenaga kerja) tetapi dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasanya yang diterima oleh tenaga kerja hanya upah pokoknya saja tidak termasuk tunjangan hidupnya, sehingga ini menimbulkan suatu permasalahan yang kontroversi bagi tenaga kerja dan perusahaan. Pengertian tunjangan tetap adalah upah yang ditetapkan tanpa melihat

tingkat output yang dihasilkan maupaun kehadiran pekerja, contohnya tunjangan keluarga dan tunjangan yang berdasarkan senioritas yang mana ini akan selalu mendapatkan tunjangan pokok tanpa dilihat dari tingkat output.

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 (UU, 2003) disebutkan bahwasanya upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja nol sampai dengan satu tahun. Sumarsono dalam Devanto Shasta Pratomo & Putu Mahardika Adi Saputra (2011), menyampaikan bahwa upah minimum terdiri atas dua unsur penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Upah minimum merupakan pendapatan terendah tenaga kerja yang diterima pada saat pertama kali diterima bekerja.
- b. Upah minimum harus dapat memenuhi komponen-komponen dasar penduduk (tenaga kerja) baik individu maupun kelompok agar dapat hidup dengan layak yang sesuai dengan standar kehidupan manusia

Sumarsono dalam Devanto Shasta Pratomo & Putu Mahardika Adi Saputra (2011) mengemukakan bahwa upah merupakan sumber utama pendapatan seorang pekerja, sehingga upah minimum harus dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja beserta keluarganya dalam batas wajar. Kebijakan batas kewajaran dalam upah minimum yang ada di Indonesia diukur dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) atau yang sering disebut pada saat ini yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan menunjukkan hanya sedikit perusahaan yang dapat berusaha untuk meningkatkan tingkat

penghidupan karyawan, terutama tenaga kerja yang tergolong pada pekerja golongan yang paling rendah. Biasanya di pihak lain para pekerja yang tidak mendapatkan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, melakukan unjuk rasa dengan mengundang pemerintah untuk menuntut agar dapat menaikkan upah para pekerja, tetapi tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mengurangi tingkat tenaga kerja dengan menurunkan jumlah produksi, menggunakan teknologi yang lebih padat modal, dan terakhir dengan menaikkan harga jual atas barang produksi akan tetapi ini akan mendorong terjadinya inflasi (Sumarsono, 2003) dalam (Pratomo & Saputra, 2011).

2.2.4.2. Perbedaan Tujuan Upah Minimum Mikro dan Upah Minimum Makro

Menurut Rukmanasari (2021), upah minimum dapat dibedakan atas dua tujuan mikro dan makro, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Mikro

Tujuan secara mikro yaitu untuk menetapkan upah minimum sebagai pengaman pendapatan seorang pekerja agar pendapatannya tidak merosot, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekerja di tingkat paling bawah dan akan mengurangi kesenjangan upah.

2. Secara Makro

Tujuan secara makro yaitu penetapan upah minimum untuk pemerataan tingkat pendapatan para pekerja, peningkatan daya beli, kesempatan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas pekerja,

dan memperlancar hubungan komunikasi antara pekerja (karyawan) dan perusahaan.

2.2.5. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno dalam Nadia Ika Purnama (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah yang meningkatkan jumlah produksi barang maupaun jasa sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, karena semakin banyaknya jumlah barang yang di produksi maka perusahaan akan semakin banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat pendapatan masyarakat (tenaga kerja) juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan makro dalam jangka panjang karena laju pertumbuhan disetiap tahunnya selalu berbeda terkadang naik dan terkadang juga turun, oleh karena itu dalam makro ekonomi ketika suatu negara atau daerah dalam proses pertumbuhan ekonomi maka harus melakukan peningkatan produksi barang dan jasa dalam jangka panjang.

2.2.5.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Gaol (2016), menyampaikan dalam teori Keynes bahwasanya kondisi perekonomian makro dapat berpengaruh terhadap perekonomian yang lingkupnya lebih kecil (mikro). Didalam pendapat ekonomi klasik, bahwasanya peningkatan output potensial merupakan faktor pendorong kinerja perekonomian. Namun Keynes menjelaskan bahwasanya yang merupakan faktor perekonomian suatu negara adalah adanya kenaikan permintaan terutama ketika perekonomian sedang berjalan lambat,

kemudian Keynes juga memiliki pendapat bahwa kebijakan pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menggerakkan permintaan. Yang mana ketika pemerintah menggerakkan permintaan dalam sektor meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka akan berdampak pada kenaikan uang yang beredar dimasyarakat sehingga kecenderungan masyarakat untuk konsumsi juga akan meningkat. Selain meningkatnya konsumsi, masyarakat juga akan cenderung menabung sehingga ketika tabungan meningkat maka dapat dimanfaatkan untuk investasi yang akan mendorong perekonomian menuju perekonomian yang lebih baik. Menurut Kartika Dewi dkk (2015) dalam Ilham Assagaf (2019), menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam teorinya Keynes, menyampaikan ketika ada peningkatan konsumsi masyarakat maka akan memberikan dampak pendapatan kepada masyarakat lainnya sehingga dari keterkaitan ini akan memberikan keuntungan ke dua belah pihak, dengan adanya aktivitas ekonomi yang seperti ini maka akan mendorong perekonomian menuju ke perekonomian yang lebih baik. Akan tetapi ketika terjadinya *great depression*, menurut Wibowo (2015) dalam Ilham Assagaf (2019) akan berdampak pada lesunya perekonomian karena masyarakat akan mengurangi belanjanya dan kemudian memilih untuk menabungkan uangnya.

Keynes memberikan solusi ketika adanya hambatan dalam perekonomian yaitu dengan cara adanya campur tangan pemerintah dan publik, Kartika dkk (2015) dalam Ilham Assagaf (2019). Dalam teori Keynes menyampaikan bahwa campur tangan sektor publik untuk

meningkatkan perekonomian secara umum, tetapi pendapat Keynes pada saat itu bertentangan dengan teori kapitalis yang populer pada saat itu (*laissez faire capitalism*). Dalam teori kapitalis memberikan pendapat bahwasanya pemerintah tidak boleh campur tangan terhadap keadaan pasar karena akan menghambat perekonomian, dalam teori kapitalis juga pemerintah harus membebaskan pasar agar pasar bisa berjalan menuju keseimbangannya sendiri. Kemudian Keynes memberikan pendapat bahwa perekonomian pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kebebasan dalam mengelola perekonomian, jika pihak swasta diberikan kebebasan sepenuhnya maka akan berdampak pada perekonomian yang tidak kondusif karena seperti yang dikatakan oleh pemikir ekonomi sosialis pihak swasta hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan dirinya sendiri sehingga dapat berdampak buruk pada perekonomian. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangatlah penting dalam pasar guna untuk mengatur dan memberikan kebijakan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik, (Kartika dkk, 2015) dalam (Assagaf, 2019).

Dalam teori Keynes juga mengemukakan dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong tabungan, tetapi pemerintah tidak mendorong peningkatan konsumsi. Kemudian dia, juga mendorong dengan adanya pendistribusian kekayaan agar dapat terkendali, pernyataan ini dikemukakan oleh Kintage, Badani (2007) dalam Ilham Assagaf (2019). Teori Keynes menyimpulkan pernyataan tersebut, bahwa ada alasan dalam mendorong pendistribusian kemakmuran yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat berbelanja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, daripada

menyimpan uangnya yang mana akan memberikan dampak tidak kondusif pada perekonomian.

2.3. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1. Hubungan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kemiskinan merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen (indeks pembangunan manusia), oleh karena itu kesehatan dan pendidikan suatu penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah karena ketika pemerintah dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan agar anak-anak yang sedang duduk dibangku sekolah dapat mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dengan baik. Sehingga ketika suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang baik maka suatu penduduk dapat mempunyai keahlian sehingga produktivitas suatu penduduk akan meningkat dan pendapatan perkapita juga dapat meningkat. Hal ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perekonomian suatu negara meningkat yang kemudian tingkat kemiskinan akan menurun. Dengan menurunnya tingkat kemiskinan suatu negara menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pendapatan suatu penduduk, karena pendapatan suatu penduduk merupakan hasil dari pembangunan manusia, oleh karena itu orang miskin ketika berpartisipasi terhadap pembangunan ekonomi mereka mengandalkan tenaganya agar dapat menghasilkan pendapatan dan membantu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi kemiskinan menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan karena kemiskinan merupakan permasalahan komponen-komponen

dasar yang tidak terpenuhi seperti rendahnya pendidikan, rendahnya asupan gizi, dan rendahnya kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut menandakan rendahnya IPM suatu negara sehingga penduduk miskin tidak dapat menghasilkan pendapatan (Kanbur & Squire, 1999).

2.3.2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan merupakan suatu investasi yang berkembang secara pesat dan juga semakin diyakini oleh beberapa negara bahwasanya pendidikan merupakan kunci untuk menggapai keberhasilan dalam pembangunan dari berbagai sektor. Karena sektor pendidikan telah diidentifikasi sebagai kunci dalam keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi dan kesetaraan pendidikan yang berkualitas sudah menjadi tujuan dalam kebijakan pembangunan. Ketika suatu negara mengalami ketimpangan pendidikan yang tinggi, maka ini menunjukkan tingkat inovasi yang sangat rendah, tingkat efisiensi produksi yang rendah, dan cenderung untuk mentransmisi kemiskinan antar lintas generasi (World Bank dalam Winiarti, 2014: 11).

Menurut Khusnaini dalam Syam (2014), menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah sebagai input pembangunan ekonomi yang telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 menjelaskan bahwasanya yang menjadi penyebab terciptanya kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pentingnya skala ekonomi, dan pembentukan kemampuan dan keahlian kualitas manusia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan yang

dimiliki masyarakat, maka akan memudahkan suatu penduduk di setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi. Dengan begitu, tingkat standar ekonomi akan meningkat dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah disektor pendidikan harus ditingkatkan, karena bagaimanapun ketika suatu negara atau daerah ketika dalam proses pembangunan kunci keberhasilannya adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah disektor pendidikan guna untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, karena ketika pengeluaran pemerintah rendah dalam sektor pendidikan maka kualitas pendidikan juga akan rendah sehingga kualitas penduduk juga akan rendah karena pendidikan yang didapat tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan pendidikan nasional. begitu juga sebaliknya ketika pengeluaran pemerintah disektor pendidikan meningkat maka kualitas pendidikan juga akan meningkat sehingga kualitas masyarakat juga akan meningkat karena mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan angka melek huruf suatu penduduk sehingga akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena kemampuan yang dimilikinya, yang didapat pada saat duduk dibangku pendidikan.

2.3.3. Hubungan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Upah minimum dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, karena ketika nilai upah meningkat maka kualitas sumberdaya juga akan meningkat. Upah merupakan suatu balas jasa dari

perusahaan untuk karyawan (tenaga kerja) guna untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat hidup dengan layak baik untuk individu maupun untuk kelompok. Besar kecilnya nilai upah akan menentukan tingkat konsumsi untuk kebutuhan dasar manusia, sehingga dapat diartikan ketika nilai upah yang diberikan besar maka tingkat konsumsi suatu penduduk akan meningkat guna untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat hidup dengan layak, tetapi ketika nilai upah yang diterima kecil maka tingkat konsumsi juga akan menurun dan indeks pembangunan manusia juga akan menurun.

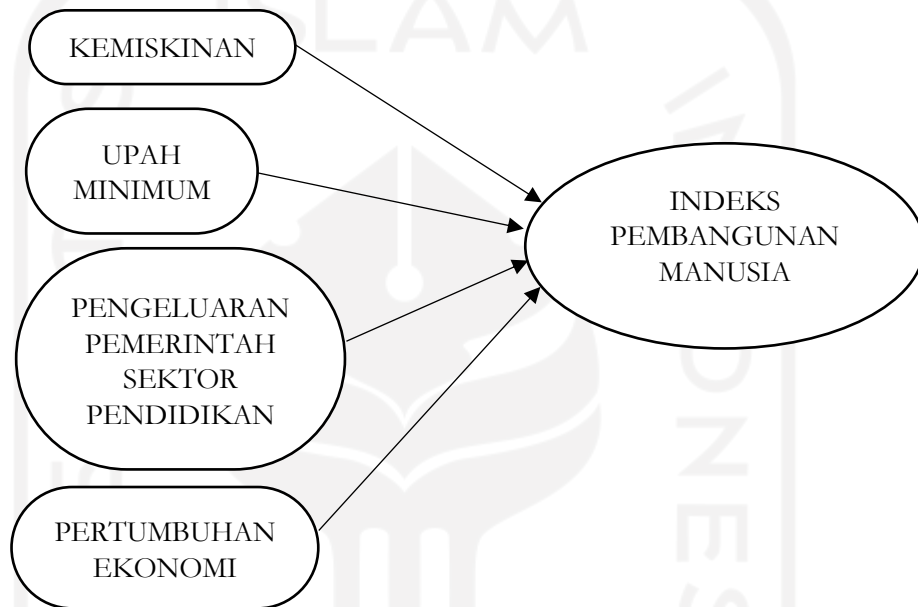
2.3.4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama yaitu aktivitas rumah tangga serta mencakup organisasi kemasyarakatan, dan yang kedua belanja dan kebijakan pemerintah. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap indikator peningkatan pembangunan manusia disektor belanja rumah tangga seperti peningkatan konsumsi, air bersih, peningkatan kesehatan, dan peningkatan dalam pendidikan (UNDP, 1996).

Kecenderungan dalam aktivitas belanja rumah tangga berkaitan langsung dengan indeks pembangunan manusia yang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Tingkat pendapatan dapat dilihat dari seberapa besar PDRB perkapita suatu negara, ketika PDRB perkapita meningkat maka akan meningkatkan aktivitas belanja rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia, tetapi ketika PDRB perkapita menurun akibat dari lambatnya pertumbuhan ekonomi maka

pengeluaran belanja rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia juga ikut menurun (Ananta, 1990).

2.4. Kerangka Penelitian



2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diajukan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan diduga berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.

3. Upah minimum diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.
4. Pertumbuhan ekonomi diduga pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel dependen atau variabel terikatnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana variabel dependen ini merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independent (variabel bebas). Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen adalah tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dengan data *cross-section* 4 Kabupaten dan 4 Kota yang berada di Provinsi Banten dan data *time-series* tahun 2016-2020. Adapun penjelasan mengenai operasional variabel baik dependen maupun independen yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Variabel Y pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, yang mana IPM ini dijadikan sebagai tolak ukur capaian pembangunan manusia dalam hal terpenuhinya komponen-komponen dasar standar hidup manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan layak. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut 4 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Banten pada priode 2016-2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten.

b. Variabel Independen

Variabel X1 pada penelitian ini adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu penduduk yang tidak mempunyai pendapatan sehingga tidak mampu untuk memenuhi komponen-komponen dasar untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Tingkat Kemiskinan (TK) menurut 4 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Banten pada priode 2016-2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten.

c. Variabel Independen

Variabel X2 pada penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat membentuk kualitas kemampuan dan keahlian terhadap teknologi sehingga suatu penduduk akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dapat disimpulkan ketika suatu penduduk dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan maka suatu penduduk juga akan mendapatkan pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik untuk individu maupun kelompok. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) menurut 4 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Banten pada priode 2016-2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten.

d. Variabel Independen

Variabel X3 pada penelitian ini adalah upah minimum. Upah minimum merupakan suatu nilai pendapatan yang dipertahankan seorang tenaga kerja guna untuk memenuhi kebutuhan komponen-komponen dasar agar dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan standar hidup manusia. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Upah Minimum (UM) menurut 4 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Banten pada priode 2016-2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Banten.

e. Variabel Independen

Variabel X4 pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan pada aktivitas ekonomi sehingga dapat menciptakan suatu kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Kemudian data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE) menurut 4 Kabupaten dan 4 Kota di provinsi Banten pada priode 2016-2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data skunder tahun 2016-2020 sumber data skunder ini, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Jenis data panel pada penelitian ini dapat menghasilkan lebih banyak kelebihan, sehingga dalam penelitian ini menggunakan data panel agar dapat menyediakan data yang lebih banyak karena data panel itu merupakan gabungan antara dua jenis data yaitu *time series* dan *cross-section* sehingga dapat menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Pada analisis ini menjelaskan mengenai hubungan antara variabel dependen (terikat) Indeks Pembangunan Manusia dengan variabel independen (bebas) yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk model analisis yang digunakan pada penelitian ini agar dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Persamaan model: } Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X₁ = Kemiskinan (KM)

X₂ = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP)

X₃ = Upah Minimum (UM)

X₄ = Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Dalam penelitian ini logaritme yang digunakan adalah dalam bentuk semi log linier (semi log). Yang mana semi log memiliki beberapa keuntungan dibandingkan non semi log diantaranya:

- a. Koefisien-koefisien model semi log memiliki interpretasi yang sederhana.

- b. Model semi log sering mengurangi masalah-masalah yang muncul dalam statistic umum yang dikenal sebagai *heteroskedastisitas*.
- c. Model semi log mudah dihitung.

Sehingga persamaan penelitian dengan model semi log adalah sebagai berikut: $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log} X_{2it} + \beta_3 \text{Log} X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$

Selanjutnya yang digunakan pada analisis persamaan regresi menggunakan data variabel dependen (terikat) dan independen (bebas) dengan menggunakan tiga metode, yaitu sebagai berikut:

1. Metode *Common Effect*

Metode common effect adalah metode yang paling utama ketika melakukan estimasi pada data panel dengan menggabungkan data *cross-section* dan data *time series* tanpa melihat perbedaan pada dua data antar waktu dan individu yang menghasilkan banyaknya observasi (Siti Nur Fatimah, 2018). Persamaan metode common effect yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = variabel dependen

i = banyaknya observasi

t = banyaknya waktu

x_1-x_4 = variabel independen

β = koefisien *slope* atau koefisien arah

β_0 = konstanta

ϵ = komponen *error*

$\beta_5 D_{1i} - \beta_6 D_{2i}$ = variabel semu (*dummy*)

Asumsi dasar pada pendekatan metode *common effect* merupakan nilai intersep dan nilai slope antar unit *cross-section* dan unit *time series* adalah sama.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode *Fixed Effect* dalam penelitian merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode yang lain, karena dalam metode ini hanya untuk mengetahui adanya perbedaan antar obyek dengan konstanta obyek. Yangmana dalam metode ini diasumsikan bahwa slopenya tetap saman aum intersep antar individunya yang berbeda (Fatimah, 2018). Persamaan regresi metode *fixed effect* pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \beta_7 D_7 + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= variabel dependen
i	= banyaknya observasi
t	= banyaknya waktu
x_1-x_4	= variabel independen
β	= koefisien <i>slope</i> atau koefisien arah
β_0	= konstanta
ϵ	= komponen <i>error</i>
D_1	= variabel <i>dummy</i>

3. *Random Effect Model*

Widarjono dalam Siti Nur Fatimah (2018) menjelaskan bahwa variabel dummy yang terdapat dalam model *fixed effect* diasumsikan untuk mewakili

ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Tetapi pada model ini membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan sehingga dapat mengurangi efisiensi parameter, akan tetapi masalah ini dapat diatasi oleh variabel gangguan *error term* atau bisa dikenal sebagai metode *random effect*.

Yang mana persamaan random effect dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \beta_7 D_7 + u_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= variabel dependen
i	= banyaknya observasi
t	= banyaknya waktu
x_1-x_4	= variabel independen
β	= koefisien <i>slope</i> atau koefisien arah
β_0	= konstanta
ϵ	= komponen <i>error</i>
D	= variabel <i>dummy</i>

3.4. Pemilihan Model

Pemilihan model ini merupakan estimasi model data panel dengan menggunakan uji *Chow Test* dan *Hausman Test* untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga model.

3.4.1. Uji Chow Test

Chow test merupakan alat untuk melakukan pengujian agar dapat menentukan model, apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel. Ketika Chow statistik

menghasilkan nilai pengujiannya lebih besar dari F_{table} , maka ini cukup untuk penolakan terhadap Hipotesis Nol sehingga dari hasil pengujian Chow statistik ini menunjukkan model yang paling tepat untuk digunakan adalah model *fixed effect*.

3.4.2. Uji Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang paling tepat, terlepas dari apakah menggunakan model *fixed effect* yang paling tepat atau model *random effect*. Hasil penentuan nilai uji Hausman diperoleh dengan membandingkan statistik *chi-square* dengan nilai kritis *chi-square*, dan derajat kebebasan (df) yang digunakan adalah k (jumlah variabel bebas). Hipotesis yang ada adalah sebagai berikut:

Jika statistik uji Hausman lebih besar dari nilai kritis maka menolak H_0 , dan jika statistik uji Hausman lebih kecil dari nilai kritis maka menerima H_0 . Maka ketika menolak H_0 model yang digunakan adalah model *fixed effect* dan ketika menghasilkan menerima H_0 dan model yang digunakan adalah *random effect*.

3.5. Analisis Statistik

3.5.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Dilakukannya koefisien determinasi untuk mengukur kesetaraan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R^2 (koefisien determinasi) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Kisaran R^2 adalah 0-1. Ketika nilai R^2 mendekati 0, pengaruh semua variabel independent (bebas)

terhadap variabel dependen (terikat) kecil, dan sebaliknya, ketika R^2 mendekati nilai 1, pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen besar.

3.5.2. Uji F

Tujuan dari uji F adalah untuk menunjukkan apakah variabel bebas yang digunakan dalam model memiliki pengaruh yang sama sebesar terhadap variabel terikat. Uji F untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F dan kriteria untuk pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Hipotesis:

H_0 = variabel bebas (independen) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen)

H_a = variabel bebas (independen) dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen)

Pengambilan keputusan:

1. Jika $F\text{-hitung} < F\text{ tabel}$, maka hasilnya H_0 diterima yang artinya semua variabel bebas secara bersamaan tidak dapat mempengaruhi variabel terikat.
2. Jika $F\text{-hitung} > F\text{ tabel}$, maka hasilnya H_a ditolak yang artinya semua variabel bebas secara bersamaan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.3. Uji t

Digunakannya uji t untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individu sehingga variabel independen dianggap lebih konstan. Hipotesis alternatifnya adalah:

H_0 = Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

H_a = Variabel bebas berpengaruh positif signifikan yang besar terhadap variabel terikat.

H_a = Variabel bebas berpengaruh negatif signifikan yang besar terhadap variabel terikat.

Keterangan:

1. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka hasilnya H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hasilnya H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Banten

4.1.1. Letak Geografis, Administratif dan Luas Wilayah

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administrative yang mana sebelum tahun 2000 Banten merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat seiring berjalannya waktu dan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang secara administratif pada tahun 2000 Banten resmi menjadi salah satu Provinsi di pulau jawa. Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang, dengan luas 9.160,70 Km². Provinsi Banten berada pada letak geografis batas Astronomi 105°1'11²-106°7'12² BT dan 5°7'50²-7°1'1² LS, dengan penduduk yang berjumlah sebesar 12.548.986 jiwa.

Letak Provinsi Banten berada dibagian ujung barat pulau jawa, yangmana Provinsi Banten sendiri merupakan pintu gerbang pulau jawa dan sumatera. Provinsi Banten juga berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara, sehingga posisi geostrategis Provinsi Banten dijadikan sebuah jembatan penghubung perdagangan Sumatera-Jawa. Bukan hanya itu saja Provinsi Banten juga merupakan salah satu bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional dan juga merupakan lokasi aglomerasi perekonomian dan kependudukan yang potensial.

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sekaligus menjadi pendukung dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia) berdasarkan data tahun 2016-2020. Dibawah ini merupakan deskripsi nilai statistik *mean* atau rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi.

Tabel 4.2.1. Deskripsi Data Penelitian

Statistik Deskriptif	Vol_IPM	Vol_KM	Vol_PPSP	Vol_UM	Vol_PE
	(Y)	(X1)	(X2)	(X3)	(X4)
Mean	70.77	85.99	37754.55	3222604.35	4.17
Maksimum	81.48	242.16	302885.00	4246081.00	7.49
Minimum	62.03	13.2	147.63	1965000.00	-6.92
Standar Deviasi	5.97	57.83	80630.87	654682.05	3.40

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel yang berbentuk data *time series* dan data *cross-section* sebagai bahan untuk diteliti pada penelitian ini. Kemudian variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Terikat)

Pada variabel dependen ini menggunakan data indeks pembangunan manusia tahun 2016-2020 berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yang terdiri dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang,

Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan.

2. Variabel Independen (Bebas)

- a. Jumlah kemiskinan pada variabel independen ini berupa jumlah kesmiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan ribu jiwa dengan kurun waktu selama lima tahun.
- b. Jumlah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berdasarkan Kabupaten/kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan milyar dengan kurun waktu selama lima tahun.
- c. Jumlah upah minimum berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan ribu rupiah dengan kurun waktu selama lima tahun
- d. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam bentuk satuan persen dengan kurun waktu selama lima tahun.

4.2.1. Hasil dan Analisis Data

4.2.1.1. Pemilihan Model Regresi Semi Log

Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Regresi data panel memiliki tiga model yang dapat digunakan ketika sedang melakukan penelitian yaitu *Common Effects*, *Fixed effects* dan *Random Effects*. Dari tiga model yang dimiliki regresi data panel harus dipilih salah satu model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, dalam proses pemilihan model yang paling tepat maka harus melakukan pengujian dengan menggunakan *Uji Chow Test* dan *Uji Hausman Test*. Hasil dari *Uji Chow Test* yaitu untuk menentukan model regresi yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian antara *Common Effects* dan *Fixed Effects*, sedangkan hasil

dari *Uji Hausman Tests* yaitu untuk menentukan model regresi yang lebih tepat untuk digunakan antara model *Random Effects* dan *Model Fixed Effect*.

Dalam penelitian ini logaritme yang digunakan adalah dalam bentuk semi log linier (semi log). Yangmana semi log memiliki beberapa keuntungan dibandingkan non semi log diantaranya:

- d. Koefisien-koefisien model semi log memiliki interpretasi yang sederhana.
- e. Model semi log sering mengurangi masalah-masalah yang muncul dalam statistik umum yang dikenal sebagai *beteroskedastisitas*.
- f. Model semi log mudah dihitung.

Sehingga persamaan penelitian dengan model semi log adalah sebagai berikut: $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log} X_{2it} + \beta_3 \text{Log} X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$

4.2.1.2. Uji Common Effects

Tabel 4.2.1.2.1

Hasil Pengujian Common Effects

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/12/21 Time: 14:38
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-221.5334	60.50488	-3.661413	0.0008
KM	-0.014176	0.013032	-1.087797	0.2841
LOGPPSP	-0.259561	0.889214	-0.291899	0.7721
LOGUM	19.68719	3.816522	5.158411	0.0000
PE	0.241298	0.692016	0.348688	0.7294
R-squared	0.505083	Mean dependent var		70.99250
Adjusted R-squared	0.448521	S.D. dependent var		5.975852
S.E. of regression	4.437765	Akaike info criterion		5.934647
Sum squared resid	689.2814	Schwarz criterion		6.145757
Log likelihood	-113.6929	Hannan-Quinn criter.		6.010978
F-statistic	8.929733	Durbin-Watson stat		0.123816
Prob(F-statistic)	0.000044			

4.2.1.3. Uji Fixed Effects

Tabel 4.2.1.3.1

Hasil Uji Fixed Effects

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/12/21 Time: 14:41
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.430770	4.562897	-1.409361	0.1697
KM	-0.001272	0.004156	-0.306109	0.7618
LOGPPSP	-0.091535	0.038273	-2.391665	0.0237
LOGUM	5.232126	0.295966	17.67815	0.0000
PE	-0.024873	0.032867	-0.756787	0.4555

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999535	Mean dependent var	70.99250
Adjusted R-squared	0.999352	S.D. dependent var	5.975852
S.E. of regression	0.152104	Akaike info criterion	-0.685179
Sum squared resid	0.647798	Schwarz criterion	-0.178515
Log likelihood	25.70358	Hannan-Quinn criter.	-0.501985
F-statistic	5470.009	Durbin-Watson stat	1.697082
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.2.1.4. Uji Random Effects

Tabel 4.2.1.4.3
Hasil Uji Random Effects

Dependent Variable: IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/12/21 Time: 14:44
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.568664	4.891921	-1.342758	0.1880
KM	-0.001715	0.004121	-0.416084	0.6799
LOGPPSP	-0.092652	0.038255	-2.421970	0.0208
LOGUM	5.244775	0.295841	17.72838	0.0000
PE	-0.026191	0.032813	-0.798199	0.4301

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.008152	0.9991
Idiosyncratic random		0.152104	0.0009

Weighted Statistics			
R-squared	0.926390	Mean dependent var	0.964163
Adjusted R-squared	0.917977	S.D. dependent var	0.543344
S.E. of regression	0.155612	Sum squared resid	0.847525
F-statistic	110.1194	Durbin-Watson stat	1.296378
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.223347	Mean dependent var	70.99250
Sum squared resid	1081.661	Durbin-Watson stat	0.001016

4.2.1.5. Uji Chow Test

Tabel 4.2.1.5.4
Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4252.151463	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.793050	7	0.0000

H0: Common Effect Model

Ha: Fixed Effect Model

Diperoleh dalam uji Chow p-value sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$ sehingga menolak H0 atau menerima Ha. Artinya model terbaik adalah Fixed Effect Model.

4.2.1.6. Uji Hausman Test

Tabel 4.2.1.6.5
Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.632881	4	0.2283

H0: *Random Effect Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

Diperoleh dari uji_hausman p-value sebesar $0,2283 > 5\%$ sehingga gagal menolak H0 atau menerima H0. Artinya model yang paling tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

4.2.2. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan dari hasil pemilihan model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa model yang paling tepat untuk digunakan dan dapat melakukan estimasi terbaik adalah model Random Effect.

4.2.2.1. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien R^2 memiliki nilai sebesar 0.926390, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi mampu untuk menjelaskan pada variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia sebesar 92.63%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 7.37%, yang dijelaskan oleh variabel lain yang diluar model.

4.2.2.2. Uji f (pengujian variabel secara bersama-sama)

Uji f dilakukan guna untuk mengetahui apakah variabel independen (kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) secara bersamaan dapat mempengaruhi variabel dependen (indeks pembangunan manusia) atau tidak, oleh karena itu dilakuknlah uji f. Berdasarkan hasil dari uji f diperoleh f statistik sebesar 110.1194 dengan probabilitas f statistik sebesar $0.00000 < \alpha = 5\%$, artinya H0 ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu

kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia).

1.2.2.2. Interpretasi Hasil

Dengan Uji *Random Effect Model*, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log} X_{2it} + \beta_3 \text{Log} X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

$$Y_{it} = 6.568664 - 0.001715 X_1 - 0.092652 X_2 + 5.244775 X_3 - 0.026191 X_4 + e_{it}$$

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi tersebut dengan memiliki nilai konstanta sebesar 6.56 persen menjelaskan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memiliki kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi maka indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 6.56 persen. Ditinjau dari konstanta Kabupaten/Kota di Provinsi Banten bahwa nilai indeks pembangunan manusia tertinggi berada pada Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar (80.992) dan nilai indeks pembangunan manusia terendah berada pada Kabupaten Lebak yaitu sebesar (63.378).

Dari hasil regresi kemiskinan yang diperoleh memiliki nilai koefisien, yang mana dari hasil nilai tersebut menunjukkan ketika kemiskinan naik sebesar 1 ribu jiwa maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0.001715 persen jika variabel independen (bebas) lainnya dalam keadaan konstan. Nilai koefisien regresi kemiskinan memiliki nilai negatif yang artinya ketika semakin besar nilai negatif yang diperoleh dari hasil

regresi kemiskinan maka indeks pembangunan manusia akan semakin menurun.

Dari hasil regresi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -0.092652 , yang mana dari hasil nilai regresi tersebut menunjukkan ketika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan naik sebesar 1 milyar maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0.092652 persen jika variabel independen (bebas) lainnya dalam keadaan konstan. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sektor pemerintah memiliki nilai negatif yang artinya ketika semakin besar nilai negatif yang diperoleh dari hasil regresi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka indeks pembangunan manusia akan semakin menurun.

Dari hasil regresi upah minimum memiliki nilai koefisien sebesar 5.244775 , yang mana dari hasil nilai regresi tersebut menunjukkan ketika upah minimum naik 1 ribu rupiah maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 5.244775 persen jika variabel independen (bebas) lainnya dalam keadaan konstan. Nilai koefisien regresi upah minimum positif yang artinya ketika semakin besar nilai positif yang diperoleh dari hasil regresi upah minimum maka indeks pembangunan manusia akan semakin meningkat.

Dari hasil regresi pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien, yang mana dari hasil nilai regresi tersebut menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi naik 1 persen maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 0.026191 persen jika variabel independen (bebas) lainnya dalam keadaan konstan. Nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi negatif yang artinya ketika semakin besar nilai negatif yang

diperoleh dari hasil regresi pertumbuhan ekonomi maka indeks pembangunan manusia akan semakin menurun.

4.2.2.3. Uji t (pengujian variabel secara individual)

1. Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Banten memiliki nilai koefisien -0.001715, dengan t hitung sebesar -0.416084 dan probabilitasnya sebesar 0.6799. Sehingga probabilitas kemiskinan lebih besar dari $\alpha = 5\%$, yang artinya kemiskinan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Banten memiliki nilai koefisien -0.092652, dengan t hitung -2.421970 dan probabilitasnya sebesar 0.0208. Sehingga probabilitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, yang artinya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Upah Minimum

Upah minimum di Provinsi Banten memiliki nilai koefisien 5.244775, dengan t hitung 17.72838 dan probabilitasnya sebesar 0.0000. Sehingga probabilitas upah minimum lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, yang artinya upah minimum signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten memiliki nilai koefisien -0.026191, dengan t hitung -0.798199 dan nilai probabilitas sebesar 0.4301. Sehingga probabilitas pertumbuhan ekonomi lebih besar dari $\alpha = 5\%$, yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.1. Hasil dan Pembahasan

4.3.1. Pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena nilai probabilitas kemiskinan 0.6799 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang artinya tidak signifikan. Artinya naik turunnya indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh kemiskinan. Menurut Kasanah, (2016) dalam Ermilia Khristina Kiha dkk, (2021) menyampaikan bahwasanya peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sehingga akan diiringi dengan menurunnya jumlah kemiskinan, dengan demikian indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh dalam menurunkan jumlah kemiskinan, dikarenakan IPM memiliki beberapa indikator yaitu angka melek huruf, angka konsumsi perkapita, dan angka harapan hidup. Tetapi di Provinsi Banten pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi *gini ratio* disetiap semesternya sehingga pendapatan penduduk di Provinsi Banten tidak merata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan

pengaruh dari variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3.2. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 0.0208 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang artinya signifikan, sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0.092652 artinya berpengaruh negatif yang berarti ketika ada kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1 milyar maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar -0.092652 persen, karena nilai koefisien pengeluaran pemerintah negatif sehingga ketika nilai koefisien menghasilkan nilai negatif yang semakin besar maka indeks pembangunan manusia akan semakin menurun.

Dalam penelitian ini hasil yang didapat berbanding terbalik dengan hipotesis dan teori-teori sebelumnya, yang mana ketika ada pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan naik. Tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil yang berbanding terbalik, yang mana ketika pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Pengaruh negatif yang dihasilkan dalam variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan karena pada tahun 2016-2020 pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten tidak efisien sehingga tidak dapat untuk

menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Rachma Agustini BR Ginting (2021), bahwasanya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak efektif dan tidak efisien sehingga hasilnya berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

4.3.3. Pengaruh upah minimum terhadap indeks pembangunan manusia

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena nilai probabilitas upah minimum 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ yang artinya signifikan, sedangkan nilai koefisiennya sebesar 5.244775 artinya berpengaruh positif yang berarti ketika ada kenaikan upah minimum sebesar 1 ribu rupiah maka indeks pembangunan manusia akan mengalami kenaikan sebesar 5.244775 ribu rupiah, karena nilai koefisien upah minimum positif sehingga ketika nilai koefisien menghasilkan nilai positif yang semakin besar maka indeks pembangunan manusia akan semakin meningkat.

Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang mana dari keterkaitan ini menunjukkan bahwa ketika nilai upah meningkat maka kualitas sumberdaya juga akan meningkat. Upah merupakan suatu balas jasa dari perusahaan untuk karyawan (tenaga kerja) guna untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat hidup dengan layak baik untuk individu maupun untuk kelompok. Besar kecilnya nilai upah akan menentukan tingkat konsumsi untuk kebutuhan dasar manusia, sehingga dapat dikatakan ketika nilai upah yang diberikan besar maka tingkat konsumsi suatu penduduk akan meningkat guna untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu

pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf (2014). Artinya ketika suatu penduduk dapat memenuhi komponen-komponen dasarnya maka akan memberikan dampak baik terhadap indeks pembangunan manusia sehingga akan meningkatkan IPM.

4.3.4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia

Hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan model *Random Effect* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi 0.4301 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ yang artinya tidak signifikan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti, yang seharusnya pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara langsung, sehingga pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi akan memberikan tambahan pendapatan suatu penduduk pada priode tertentu, dengan meningkatnya pendapatan perkapita suatu penduduk maka akan diiringi dengan naiknya IPM. Dapat diartikan ketika suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan nasional maka akan semakin besar pembukaan kapasitas produksi baru sehingga akan lebih menyerap tenaga kerja baru, dengan demikian pendapatan perkapita suatu penduduk akan meningkat. Ketika pendapatan perkapita disuatu daerah meningkat maka angka harapan hidup juga akan

meningkat karena dengan pendapatan tersebut masyarakat dapat memenuhi komponen-komponen dasarnya yang sesuai dengan standar kehidupan manusia, kemudian IPM pada suatu daerah akan ikut meningkat juga. Akan tetapi pada tahun 2016-2020 di Provinsi Banten terjadinya ketimpangan pendapatan, sehingga hanya segelintir orang saja yang mengalami peningkatan pendapatan sedangkan yang lainnya pendapatannya tetap. Sehingga dalam hal ini indeks pembangunan manusia tidak bisa menurun karena terjadinya ketimpangan pendapatan meskipun pertumbuhan ekonomi sedang mengalami peningkatan, yang seharusnya dari 100 orang dapat merasakan kenaikan pendapatan sedangkan 70% nya pendapatannya tetap. Hasil dari penelitian sebelumnya juga yang diteliti oleh Nofrian Eka Putra (2018), menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu terjadinya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan pengaruh secara langsung pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah variabel independen meliputi kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel dependen adalah indeks pembangunan manusia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2020. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan, berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Artinya peningkatan kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2016-2020 tidak dapat mempengaruhi naik turunnya indeks pembangunan manusia.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Artinya ketika ada kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Banten tahun 2016-2020 yang seharusnya dapat menaikkan indeks pembangunan manusia, tetapi pada penelitian ini malah dapat menurunkan IPM dikarenakan anggaran pemerintah sektor pendidikan tidak efisien.
3. Upah minimum, berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Artinya peningkatan upah minimum di Provinsi Banten tahun 2016-2020 dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
4. Pertumbuhan ekonomi, berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Artinya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2016-2020 tidak mempengaruhi naik turunnya indeks pembangunan manusia, karena terjadinya ketimpangan pendapatan.

Dalam model penelitian ini mampu untuk menjelaskan IPM sebesar 92.63% oleh karena itu hal ini dapat dibuktikan pada uji *random effect model* pada R^2 sebesar 0.926390. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi) dapat menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) sebesar 7.37%.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan guna untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari keempat variabel independen yaitu kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dan menindak lanjuti melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel kemiskinan, tidak terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya kemiskinan tidak secara langsung memberikan dampak terhadap IPM di Provinsi Banten, walaupun begitu pemerintah harus mengupayakan untuk mengeluarkan kebijakan terbaik (misalnya peningkatan produktivitas masyarakat yang mendorong kenaikan pendapatan masyarakat) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten, sehingga dengan menurunnya kemiskinan akan mempengaruhi faktor lain misalnya

kemampuan mengakses pendidikan oleh masyarakat setempat karena kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan yang baik akan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia yang nantinya juga akan memberikan pengaruh terhadap IPM itu sendiri.

2. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perlu adanya pembenahan kualitas pendidikan diiringi dengan pengawasan terhadap dana yang dialokasikan oleh pemerintah pada sektor pendidikan, sehingga dana yang tinggi seharusnya juga mampu menaikkan IPM masyarakat setempat apabila dana tersebut dikelola dan diimplimentasikan dengan semestinya
3. Variabel upah minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM, sehingga pemerintah harus terus mengawasi kebijakan upah minimum agar tidak merugikan masyarakat khususnya maupun pihak swasta karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi IPM masyarakat setempat, dengan upah minimum yang mencukupi maka akan mendorong masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya yang juga akan mendorong peningkatan IPM.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi, tidak terbukti secara signifikan dapat mempengaruhi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini karena pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan IPM masyarakat Provinsi Banten, walaupun

begitu pemerintah harus tetap mempertimbangkan setiap kebijakan agar tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus diikuti dengan memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM khususnya di Provinsi Banten.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP*.
- Ananta, A. (1990). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arifin, M. Y. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013*. Jember: Universitas Jember.
- Assagaf, I. (2019). *Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara di ASEAN)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & W, H. K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 1-26.
- Ayub, M. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin.
- Bappenas. (2018). *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta Pusat: Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- BPS. (2006). *Satistik Pendidikan 2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*.
- Desmiarti, S. (2019). *Pengaruh PDRB Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Langkat*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Fatimah, S. N. (2018). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Gaol, L. (2016). *Pengaruh Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di ASEAN*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginting BR, A. R. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Binjai*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Hanifia, P., & Mustari, A. S. (2012). *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Herman. (2018). Pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru.
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), . *Bharanomics*.
- Kanbur, R., & Squire, L. (1999). *The Evolution Of Thinking About Poverty: Exploring The Interactions*.
- Kiha, E. K., Seran, S., & Lau, H. T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1-25.
- Kuncoro, M. (2009). *Dinamika Lingkungan Bisnis Di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marhaini, H., Yati, S., & M. Tribudhu, B. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia* . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Megantara, D. E., & Budhi, M. K. (2020). 2020Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1-29.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknoologi. *Jurnal Kependidikan*.

- Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. (2011). Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. *Of Indonesian Applied Economics*, 1-16.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi*.
- Purnama, N. I. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Medan Tahun 2000-2014. 1-8.
- Putra, N. E. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015.
- Rukmanasari. (2021). *Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sanggalorang, S. M., Rumatea, V. A., & Siwu, H. F. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-11.
- Santiko, B. N. (2009). *Analisis Keterkaitan: Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, Dan Kemiskinan Di Pedesaan Sentra Pertanian Indonesia Priode 1993-2005*. Depok: Universitas Indonesia.
- Simarmata, Y. P. (2019). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Syam, S. (2014). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Universitas Hasanuddin.
- Todaro, M. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Airlangga.
- UNDP. (1996). *Human Development Report*. New York: United Nation.
- UU. (2003). *Undang Undang Republik Indonesia*. Republik Indonesia: Presiden Republik Indonesia.

- UUD. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Republik Indonesia: Indonesia.
- Zainuddin. (2015). Analisis dampak Inflasi, PDRB dan Perkembangan Upah Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Zamharir, A. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Perkapita, Dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.



LAMPIRAN

- I. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2016.

Kabupaten/Kota	IPM	KM	PPSP	UM	PE
Kab Pandeglang	63.4	115.9	778.45	1999981	5.52
Kab Lebak	62.78	111.21	784.68	1965000	5.57
Kab Tangerang	70.44	182.52	682.96	3021650	5.41
Kab Serang	65.12	67.92	524.68	3010500	5.09
Kota Tangerang	76.81	102.88	477.11	3043950	5.34
Kota Cilegon	72.04	14.9	401.97	3078058	5
Kota Serang	71.09	36.4	286.27	2648125	6.33
Kota Tangerang Selatan	80.11	26.38	288.05	3021650	6.74

- II. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017.

Kabupaten/Kota	IPM	KM	PPSP	UM	PE
Kab Pandeglang	63.82	117.31	592.99	2164979	6
Kab Lebak	62.95	111.08	502.33	2127112	5.76
Kab Tangerang	70.97	191.62	527.11	3270936	5.82
Kab Serang	65.6	69.1	487.83	3258866	5.22
Kota Tangerang	77.01	105.34	389.31	3295075	5.88
Kota Cilegon	72.29	14.89	148.41	3331997	5.5
Kota Serang	71.31	36.97	242.26	2866595	6.43
Kota Tangerang Selatan	80.84	28.73	226.57	3270936	7.3

- III. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018.

Kabupaten/Kota	IPM	KM	PPSP	UM	PE
Kab Pandeglang	64.34	116.16	678.85	2363549	5.3
Kab Lebak	63.37	108.81	617.38	2312384	5.63
Kab Tangerang	71.59	190.05	591.16	3555835	5.8
Kab Serang	65.93	64.46	529.07	3542714	5.29
Kota Tangerang	77.92	103.49	397.05	3582077	4.95
Kota Cilegon	72.65	13.96	186.97	3622215	6.11
Kota Serang	71.68	36.21	255.57	3116276	6.59
Kota Tangerang Selatan	81.17	28.21	242.26	3555835	7.49

- IV. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2019.

Kabupaten/Kota	IPM	KM	PPSP	UM	PE
Kab Pandeglang	64.91	114.09	456.24	2542539	4.75
Kab Lebak	63.88	107.93	513.55	2498068	5.55
Kab Tangerang	71.93	193.97	484.32	3841368	5.58
Kab Serang	66.38	61.54	458.25	3827193	5.01
Kota Tangerang	78.43	98.37	338.01	3869717	4.05
Kota Cilegon	73.01	13.2	147.63	3913078	5.32
Kota Serang	72.1	36.21	220.09	3366512	6.2
Kota Tangerang Selatan	81.48	29.16	181.42	3841368	7.4

- V. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020.

Kabupaten/Kota	IPM	KM	PPSP	UM	PE
Kab Pandeglang	65	120.44	115,243	2758909	-0.54
Kab Lebak	63.91	120.83	121,183	2710654	-0.88
Kab Tangerang	71.92	242.16	203,251	4168268	-3.7
Kab Serang	66.7	74.8	302,885	4152887	-1.96
Kota Tangerang	78.25	118.22	194,597	4199029	-6.92
Kota Cilegon	73.05	16.31	242,702	4246081	-0.88
Kota Serang	72.16	42.24	122,085	3773940	-1.29
Kota Tangerang Selatan	81.36	40.99	194,597	4168268	-1.01

VI. Hasil uji *cammon effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/09/21 Time: 11:10
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-221.5334	60.50488	-3.661413	0.0008
KM	-0.014176	0.013032	-1.087797	0.2841
LOGPSP	-0.259561	0.889214	-0.291899	0.7721
LOGUM	19.68719	3.816522	5.158411	0.0000
PE	0.241298	0.692016	0.348688	0.7294
R-squared	0.505083	Mean dependent var		70.99250
Adjusted R-squared	0.448521	S.D. dependent var		5.975852
S.E. of regression	4.437765	Akaike info criterion		5.934647
Sum squared resid	689.2814	Schwarz criterion		6.145757
Log likelihood	-113.6929	Hannan-Quinn criter.		6.010978
F-statistic	8.929733	Durbin-Watson stat		0.123816
Prob(F-statistic)	0.000044			

الجامعة الإسلامية
 البعثة الإسلامية
 البعثة الإسلامية

VII. Hasil uji *fixed effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/09/21 Time: 11:11
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.430770	4.562897	-1.409361	0.1697
KM	-0.001272	0.004156	-0.306109	0.7618
LOGPSP	-0.091535	0.038273	-2.391665	0.0237
LOGUM	5.232126	0.295966	17.67815	0.0000
PE	-0.024873	0.032867	-0.756787	0.4555

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999535	Mean dependent var	70.99250
Adjusted R-squared	0.999352	S.D. dependent var	5.975852
S.E. of regression	0.152104	Akaike info criterion	-0.685179
Sum squared resid	0.647798	Schwarz criterion	-0.178515
Log likelihood	25.70358	Hannan-Quinn criter.	-0.501985
F-statistic	5470.009	Durbin-Watson stat	1.697082
Prob(F-statistic)	0.000000		

VIII. Hasil uji *random effect*

Dependent Variable: IPM
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/09/21 Time: 11:12
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 40
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.568664	4.891921	-1.342758	0.1880
KM	-0.001715	0.004121	-0.416084	0.6799
LOGPSP	-0.092652	0.038255	-2.421970	0.0208
LOGUM	5.244775	0.295841	17.72838	0.0000
PE	-0.026191	0.032813	-0.798199	0.4301

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.008152	0.9991
Idiosyncratic random		0.152104	0.0009

Weighted Statistics			
R-squared	0.926390	Mean dependent var	0.964163
Adjusted R-squared	0.917977	S.D. dependent var	0.543344
S.E. of regression	0.155612	Sum squared resid	0.847525
F-statistic	110.1194	Durbin-Watson stat	1.296378
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.223347	Mean dependent var	70.99250
Sum squared resid	1081.661	Durbin-Watson stat	0.001016

IX. Hasil uji *chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4252.151463	(7,28)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.793050	7	0.0000

X. Hasil uji *hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.632881	4	0.2283